

PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN IPM TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

Nurul Masyithah^{1*}, Muhammad Nasir²

- 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
email: nurul333346@gmail.com
- 2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
email: nasirmsi@unsyiah.ac.id

Abstrack

This study aims to analyze direct spending and HDI on poverty in Aceh Province. This study uses direct expenditure variable, HDI, and poverty. The data used is the annual time series data that is 2001-2016. This research uses descriptive and quantitative research methods. Data analysis techniques that fit the problem formulation and the purpose of multiple regression analysis. Studies show that direct expenditure has a significant effect on poverty, whereas HDI has a significant positive effect on poverty. Based on the result of the F test, the variables of direct expenditure and HDI wages together have a significant effect on poverty in Aceh Province. Thus, the higher spending money directly to the APBD causes the better human resources can reduce or alleviate poverty.

Keywords: *Direct spending, HDI, and Poverty*

Abstrak

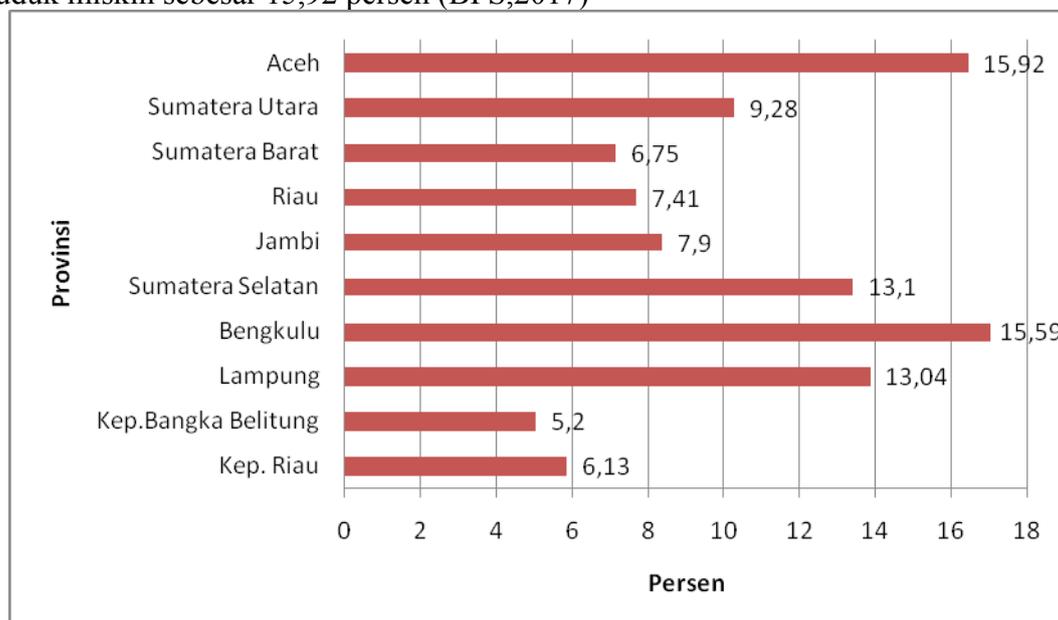
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja langsung dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. penelitian ini menggunakan variabel belanja langsung, IPM, dan kemiskinan. Data yang di gunakan adalah data *time series* tahunan yaitu tahun 2001-2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif. Teknik analisa data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian F hitung variabel belanja langsung dan ipm secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Dengan Demikian, semakin tinggi alokasi belanja langsung pada APBD menyebabkan semakin bagus sumber daya manusia sehingga dapat pengurangi ataupun mengentaskan kemiskinan.

Kata Kunci: Belanja langsung, IPM, dan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan telah menjadi persoalan global yang kompleks dan belum kunjung usai, sebab kemiskinan adalah salah satu fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Padahal keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Indonesia masih termasuk negara yang setengah penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2017 penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa (BPS,2017). Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor yang menyangkut harkat dan martabat manusia.

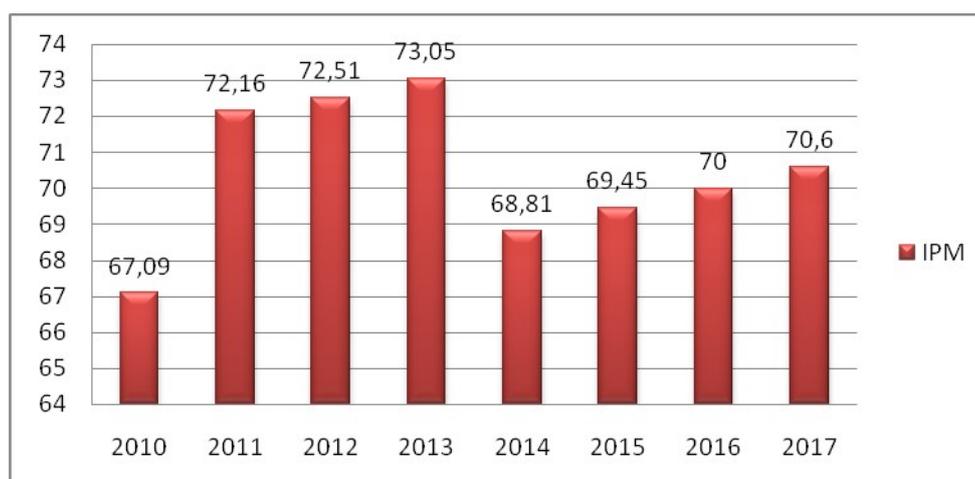
Kemiskinan mengacu pada kurangnya fisik, aset dan pendapatan, kemiskinan lebih dari sekedar miskin pendapatan, kemiskinan dapat dilihat dari dimensi kekurangan lain seperti kelemahan fisik, isolasi dan ketidakberdayaan dimana kekurangan-kekurangan tersebut saling berhubungan (Chamber dalam Risfiani, 2016). Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan berbagai upaya pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut. Masalah kemiskinan di Indonesia terjadi hampir di semua wilayah yaitu di perkotaan ataupun di pedesaan. Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat persentase penduduk miskin sebesar 15,92 persen (BPS,2017)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2017

Kemajuan suatu negara bukan hanya dihitung oleh pendapatan domestik saja, akan tetapi kemajuan suatu Negara juga dapat dilihat dengan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Menurut Mudrajad (2006) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah. IPM adalah indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan dan pelayanan publik lainnya. Rendahnya IPM berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011:8)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh, tahun 2010-2017

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, salah satu upayanya adalah dengan cara peningkatan pada pengeluaran pemerintah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Belanja langsung umumnya berkaitan dengan investasi pemerintah yang berimplikasi langsung pada kepentingan rakyat. Semakin besar alokasi belanja langsung dalam APBD, akan semakin mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Belanja langsung yaitu belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai ialah untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa ialah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja modal ialah untuk pengeluaran pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat atau disebut juga dengan belanja pembangunan yaitu pembangunan investasi fisik yang nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah (Mirza, 2011:105).

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 belanja langsung di Aceh mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2017 belanja langsung di Aceh mengalami peningkatan kembali. Namun jika dilihat hal ini tidak sesuai dengan peningkatan nilai IPM pada tahun 2017 yang lebih rendah dari Riau. Aliran dana yang meningkat ke masyarakat melalui belanja langsung diharapkan akan memberikan efek terhadap kesejahteraan masyarakat, dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin (Ratnadi, et al 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yaitu perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) (Mankiw, 2003).

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencakup seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa untuk kepentingan negara, pengeluaran tersebut dapat berupa pembelian senjata untuk negara, peralatan untuk keperluan kantor pemerintah, membangun jalan dan jembatan, membayar gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan yang lainnya. Disamping itu, pengeluaran pemerintah merupakan faktor utama yang menentukan jumlah pengeluaran agregat, dan juga faktor yang menentukan PDB riil jangka pendek (Susanti, *et al*, 2017:3).

Teori Belanja Langsung

Menurut Permendagri No 13 tahun 2006, belanja langsung ialah belanja yang dianggarkan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari beberapa macam belanja yaitu:

a. Belanja Pegawai

Pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun, atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c. Belanja Modal

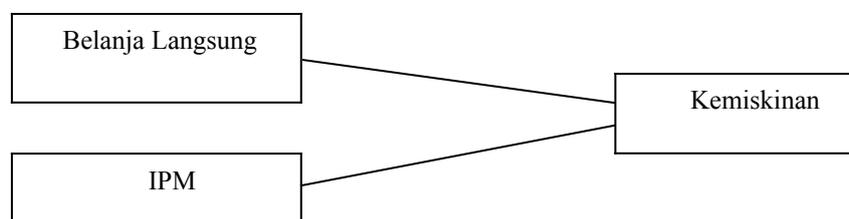
Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Parwoto, 2001). Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana pengaruh belanja langsung dan ipm terhadap kemiskinan di provinsi aceh.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan ipm terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Aspek yang dianalisis mencakup data jumlah penduduk miskin Provinsi Aceh, data indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh, dan data belanja langsung Provinsi Aceh daritahun 2001-2017.

Jenis dan Sumber Data

Jenis daata yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time* seris yaitu data yang terdiri darisatu objek namun terdiri dari beberapa periode, dalam hal ini yang menjadi objek adalah Provinsi Aceh dengan periode waktu selama 16 tahun yaitu dari tahun 2001-2017. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data–data yang digunakan dalam penelitian ini seperti jumlah penduduk miskinProvinsi Aceh, indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh dan belanja langsung Provinsi Aceh. Data-data tersebut dikumpulkan dari Badaan Pusat Statitik (BPS) Provinsi Aceh, hasil penelitian terdahulu, junal-jurnal, fasilitas internet, dan bahan literatur lainnya untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

Model Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda (*Multiple Regression Model*) dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat. Diformulasikan ke dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 BL + \beta_2 IPM + e$$

Keterangan:

- Y = Jumlah Penduduk Miskin
- BL = Belanja Langsung
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- β_0 = Konstan
- $\beta_1, \beta_2,$ = Koefisien regresi
- e = Variabel Pengganggu

HASIL PEMBAHASAN

Hasil Regresi

Tabel 1. Hasil Regresi

<i>Variabel</i>	<i>Coefficien</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob</i>
	<i>t</i>			
<i>C</i>	84.134	41.110	2.0465	0.0615
<i>Log</i>	-4.2688	1.0648	-4.0089	0.0015
<i>belanja langsung</i>				
<i>IPM</i>	0.8838	0.6053	1.4601	0.1680

Sumber : Output Eviews, 2018 (diolah)

Tabel 1. memperlihatkan hasil dari pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Eviews 9. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai konstanta

sebesar 84.134 dan koefisien regresi $\beta_1 = -4.2688$, $\beta_2 = 0.8838$. Nilai konstanta dari koefisien regresi tersebut dimasukkan kedalam persamaan model sebagai berikut:

$$P = \beta_0 + \beta_1 BL + \beta_2 IPM + e$$

Sehingga persamaan regresinya menjadi sebagai berikut:

$$P = 84.134 - 4.2688BL + 0.8838IPM + e$$

a) Nilai Konstanta

Nilai konstanta dalam persamaan ini sebesar 84.134 yang berarti jika Belanja Langsung (BL) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilainya konstan atau 0. Maka kemiskinan (Y) nilainya sebesar 84.134

b) Belanja Langsung

Nilai koefisien variabel belanja langsung sebesar -4.2688. Nilai koefisien variabel belanja langsung bernilai negatif (-) dan nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa setiap peningkatan 1% dari variabel belanja langsung akan menyebabkan penurunan pada tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 4.2%.

c) IPM

Nilai koefisien variabel IPM dalam persamaan ini sebesar 0.8838. nilai koefisien IPM memiliki nilai positif (+) dan dapat dinyatakan bahwa setiap peningkatan 1% IPM akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 0.88%.

Selain nilai konstanta dan nilai koefisien regresi, nilai dari koefisien determinasi (R^2) juga penting. Dimana koefisien determinasi (R^2) mampu mengukur seberapa jauh model tersebut dapat menerangkan variansi dari variabel belanja langsung dan ipm. Nilai koefisien determinan yang mendekati satu berarti variabel belanja langsung dan ipm memberikan hamper seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variansi variabel kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di Eviews 9 diketahui nilai koefisien determinan (R^2) sebagai berikut.

Tabel 2. Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.5529
Adjusted R-squared	0.4841
S.E. of regression	3.6587
Sum squared resid	174.02
Log likelihood	-41.7956
F-statistic	8.0383
Prob(F-statistic)	0.0053

Sumber: Output Eviews 9 (diolah), Tahun 2018

Berdasarkan hasil output eviews 9 diatas, diketahui nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.4841. Hal ini berarti variabel belanja langsung dan ipm dapat menjelaskan variabel kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 48 % dan sisanya 52 % di jelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk melihat pengaruh variabel secara simulthan atau dengan istilah lain Uji F. Dimana dapat dengan melihat nilai dari *Probability (F-Statistic)* yang dimana jika nilai *Probability (F-Statistic)* < 0,05 maka dapat diartikan bahwa ketika semua variabel bebas (X) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (Y) dengan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan output Eviews 9 diketahui bahwa nilai dari *Probability (F-Statistic)* sebesar 0.0053, yang dimana 0.0053 > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja langsung dan ipm secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya belanja langsung akan mengurangi kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. IPM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh yang pengaruh tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ipm di Provinsi Aceh akan meningkatkan kemiskinan di Provinsi Aceh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan, maka saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan analisis-analisis yang telah diuraikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur untuk Pemerintah Provinsi Aceh dalam kebijakan APBD dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi pengangguran agar dapat lebih membantu pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2017). *Aceh Dalam Angka Tahun 2017*. Aceh

_____ (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2010*. Aceh.

_____ (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2011*. Aceh.

_____ (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2012*. Aceh.

_____ (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2013*. Aceh.

_____ (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2014*. Aceh.

_____ (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2015*. Aceh.

_____ (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2016*. Aceh.

_____ (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2017*. Aceh.

Mankiw, N.G (2003). *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mirza, D. S. (2011). "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM Jawa Tengah". *JEJAK*. Vol. 4, No. 2 , 105.

- Ratnadi, Ariyanto, Wirawati. (2016). “*Analisis Pengaruh Belanja Langsung pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan di Provinsi Bali*”. Vol 11, No. 1 .
- Risfiani, M. “Kemiskinan di Kampung Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang”. *Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Sukmaraga, Prima. (2011). “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah”. Semarang; *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Susanti, H., dan Syechalad, M.N. (2017). “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Vol.4 No.1.